

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Nasional tidak lepas dari peranan usaha kecil dalam memberikan kontribusi baik berupa barang dan jasa maupun dalam penciptaan kesempatan kerja, usaha kecil di Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai kendala baik dalam pemasaran, manajemen, produksi dan yang terpenting dalam permodalan. Usaha kecil di Indonesia identik dengan serba keterbatasan pengembangan usaha. Pada pembangunan selama ini kemampuan usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja dari pertanian dan industri sangat besar.

Adapun fungsi dari usaha kecil dalam perekonomian Indonesia pertama, usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi masyarakat yang berdaya beli tinggi, selain itu usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar termasuk pemerintah lokal. Kedua, usaha kecil hingga saat ini mampu menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 40 juta orang dari 220 juta penduduk Indonesia (16%). Ketiga, usaha kecil menjadi kontribusi yang tinggi (55%) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keempat, sektor ini mempunyai peranan khusus menghasilkan devisa. Kelima, sektor ini mempunyai peranan strategis yang mengantarkan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sektor industri

Dalam pengembangan usaha kecil tidak lepas dari peranan sektor perbankan. Perbankan merupakan input bagi usaha kecil yang berupa pemberian kredit. Bank sebagai Agent of Development berwujud pemeliharaan kestabilan moneter didalam negeri dan sebagai realisasinya adalah dalam fungsi program pemerataan yaitu melalui kredit usaha kecil kepada kelas menengah kebawah. Dengan dimulai kebijakan perbankan dalam paket juni 1983 (pakjun 83) yang mencakup beberapa pokok :

1. Penghapusan pagu kredit sebagai suatu instrumen langsung bagi bank Indonesia.
2. Bank-bank diberi kebebasan untuk menentukan sendiri suku bunga deposito maupun suku bunga kredit.
3. Mengurangi pemberian kredit likuiditas. Kredit likuiditas hanya diberikan untuk sector-sektor yang berprioritas tinggi, misalnya: koperasi, pertanian dan sebagainya.

Sebagai kelanjutan dari deregulasi ekonomi dan keuangan, pemerintah mengeluarkan deregulasi baru yang dikenal pakto 27. Kebijakan ini mencakup kemudahan pembukaan kantor bank dan pendirian bank swasta baru, baik bank nasional, bank asing, bank campuran maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Pada 29 januari 1990 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pada bidang perbankan khususnya yang mengatur tentang perkreditan dengan program perkreditan untuk usaha kecil dalam kebijakan pemerintah mewajibkan 20% dari kredit likuiditas harus disalurkan bagi usaha kecil. Inti dari kebijakan tersebut dapat diuraikan dibawah ini:

1. Alokasi kredit diserahkan pada mekanisme pasar. Bank-bank bebas dalam memobilisasi dana dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam jumlah, harga, arah penggunaan maupun dalam persyaratan-persyaratan lainnya.
2. Penggunaan KLBI secara bertahap, yaitu KLBI diberikan secara terbatas untuk mendukung upaya penyampaian swasembada pangan, pengembangan koperasi, dan peningkatan investasi. Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit yang didukung oleh KLBI hanya terbatas bagi kredit pada koperasi, kredit kepada bulog untuk pengadaan pangan nasional serta pemilikan rumah sederhana.
3. Struktur bunga disesuaikan sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar pada tingkat yang wajar. Penerapan suku bunga pasar ini diperlukan untuk mendorong kesinambungan pembiayaan dunia usaha oleh perbankan dengan dana sendiri. Selain itu dengan suku bunga pasar memberikan tingkat keuntungan yang wajar bagi bank, kemudian dapat menutup biaya overhead dan resiko.
4. Untuk menjamin kelangsungan tersedianya dana bagi usaha kecil dan kegiatan koperasi. Semua bank diwajibkan menyediakan kredit dengan dana sendiri minimal 20% dari total portofolio kredit bank disalurkan untuk pengusaha kecil dan bentuk kredit usaha kecil. Kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa menurut pengalaman di Indonesia maupun di Negara-negara lain tersedianya dana lebih penting daripada harga dana. Dengan kebijakan kuota

20% diharapkan akan membantu tercapainya sasaran pemerataan, kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang utama dalam mendukung perputaran ekonomi. Dengan terhimpunnya dana oleh bank dari para debitur maka dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk kredit. Melalui kredit, sektor usaha akan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan usaha. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 1.1 bahwa perkembangan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit usaha kecil dari tahun ketahun terus meningkat.

Tabel.1
Perkembangan jumlah Dana Masyarakat dan Kredit Usaha Kecil

(Rp miliar)

	2003	2004	2005	2006	2007
Dana masy	755599	820585	932873	1096939	1289630
- giro	179812	204205	227572	276196	355272
-tabungan	244952	286898	284486	336135	543273
- deposito	422754	418581	564055	616802	664317
KUK	72647	851191	96580	102028	112575

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume penyaluran kredit juga dapat menjadi petunjuk mengenai laju perkembangan suatu sektor usaha tertentu. Hal tersebut tampak jelas pada perkembangan jumlah kredit perbankan yang mempengaruhi secara langsung sistem perekonomian kita, dimana semakin banyak kredit yang diberikan

pihak bank untuk membiayai keperluan usaha, maka semakin berkembang pula usaha tersebut. Dengan demikian kredit perbankan bisa melancarkan dan mendongkrak perekonomian menjadi maju dan berkembang, yang selanjutnya dapat meningkatkan pemerataan dan pembangunan di Indonesia seperti yang terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi

Rincian	2004	2005	2006	2007				2007
				Persen				
				I	II	III	IV	
Total Konsumsi	4.9	4.3	3.9	4.6	4.6	5.3	5.1	4.9
Konsumsi Swasta	5	4	3.2	4.7	4.7	5.1	5.6	5
Konsumsi Pemerintah	4	6.6	9.6	3.7	3.8	6.5	2	4
Investasi ¹	14.2	10.8	2.9	7	6.9	10.4	12.1	9.1
Permintaan Domestik	9.1	5.3	3.3	-0.8	3.4	4.4	9.6	4.2
Net Ekspor	-23.1	13.6	15.6	6.8	25	6.7	14.2	6.1
Ekspor barang dan jasa	11.1	16.4	9.2	8.1	9.8	6.9	7.3	8
Impor barang dan jasa	25.2	17.1	7.6	8.5	6.5	7	13.6	8.9
PDB	4.9	5.7	5.5	6.1	6.4	6.5	6.3	6.3
Distribusi PDB (%)								
Total konsumsi	68.2	67.3	66.3	64.4	65.2	63.8	68.2	65.4
Konsumsi Swasta	60.6	59.6	58.3	57.8	57.3	56.3	58.9	57.6
Konsumsi Pemerintah	7.6	7.7	8	6.5	7.9	7.4	9.3	7.8
Investasi ¹	21.4	22.5	21.9	21.5	22	22.5	23.6	22.4
Ekspor Barang dan Jasa	41.1	45.2	46.8	47	48	46.9	49.1	47.8
Impor Barang dan Jasa	32.8	36.3	37	36.8	38.2	38.8	40.2	38.5

Sumber: BPS, diolah
I pembentukan modal tetap bruto

Dengan hubungan ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan aktif dalam mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan investasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, nilai tukar rupiah yang tetap realistis, dan juga berupaya mempengaruhi perkembangan suku bunga dalam batas yang wajar, meningkatkan dan memperluas akses golongan yang berpenghasilan rendah kepada pelayanan perbankan yang menunjang kegiatan-kegiatan produktif mereka dengan jalan memperluas jaringan pelayanan perbankan ke pelosok tanah air. Perkembangan penyaluran kredit usaha kecil sangat dipengaruhi beberapa factor antara lain pendapatan nasional, suku bunga kredit, dan dana simpanan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, SUKU BUNGA KREDIT, DAN DANA MASYARAKAT TERHADAP PERMINTAAN KREDIT USAHA KECIL PADA BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2007"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional (PDB) terhadap permintaan kredit usaha kecil pada Bank Umum di Indonesia tahun 2000-2007

2. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit usaha kecil pada Bank Umum di Indonesia tahun 2000-2007
3. Bagaimana pengaruh dana masyarakat terhadap permintaan kredit usaha kecil pada bank umum di Indonesia tahun 2000-2007.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional (PDB) terhadap permintaan kredit usaha kecil pada Bank Umum di Indonesia tahun 2000-2007.
2. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit usaha kecil pada Bank Umum di Indonesia tahun 2000-2007.
3. Bagaimana pengaruh dana masyarakat terhadap permintaan kredit usaha kecil pada Bank Umum di Indonesia tahun 2000-2007.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan serta dapat memperkaya teori yang diperoleh setelah mengikuti kuliah

2. Bagi pemerintah

Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya khususnya masalah perkreditan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan atau